

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan Islam sebagai agama samawi terakhir yang dibawa oleh Muhammad SAW. Pada masa pertumbuhan, yakni ketika rasul menerima wahyu pertama. Iqro' merupakan dasar dalam praktek kependidikan Islam. Ayat tersebut menanamkan pentingnya membaca dan menulis yang disertai pengakuan adanya Dzat yang mulia. Allah menjadikan pendidikan Islam tidak dapat lepas dari nilai-nilai, khususnya nilai-nilai yang tertuang dalam bingkai Al-qur'anul Karim.

Madrasah sebagai nama salah satu sub sistem Pendidikan Nasional dan nama ini diletakan kepada Lembaga Pendidikan Islam yang beraveliasi di Departemen tersebut atau lembaga yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu agama.

Diakui bahwa model pendidikan madrasah di dalam perundang-undangan negara, memunculkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Dualisme pendidikan di Indonesia telah menjadi dilema yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Dualisme ini tidak hanya berkenan dengan pengajarannya, tetapi juga menjurus kepada keilmuannya, sehingga membuka gep antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu Umum.

Dualisme pendidikan Islam juga muncul dalam bidang menejerialnya, khususnya di lembaga swasta. Lembaga swasta umumnya memiliki dua tar

Kepala Madrasah dan Ketua Yayasan, walaupun telah ada garis kewenangan tetapi dalam prakteknya terjadi *overlapping*.

Dualisme pengelolaan pendidikan juga terjadi pada pembinaan yang dilakukan oleh departemen yaitu Departemen Agama (Depag) dan Departemen Pendidikan (Depdiknas). Pembinaan madrasah di bawah naungan Depag berhadapan sekolah umum di bawah pembinaan Depdiknas sering menimbulkan kecemburuan sejak di tingkat (SD – MI) hingga Perguruan Tinggi. Dari alokasi dana, perhatian, pembinaan manajerial, bantuan buku dan media pembelajaran serta penempatan guru, hingga pemberian beasiswa pendidikan lanjut sering tidak sama antara yang diterima oleh sekolah umum (Depdiknas).

Kesenjangan antara Madrasah Swasta dan Madrasah Negeri-pun tampaknya menjadi masalah yang belum tuntas diselesaikan. Gep tersebut meliputi beberapa hal seperti penempatan guru, pengadaan sarana dan prasarana dari departemen terkait (Malik Fajar : 1998):

Bukti dari realitas tersebut di atas adalah sebagai berikut : *Pertama*, kualitas guru madrasah yang masih rendah, tenaga guru di madrasah saat ini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu :

- a. Guru tidak layak bisa dikategorikan *unqualified* maupun *under qualified*. Artinya guru tersebut belum mempunyai kualifikasi mengajar seperti telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

b. Guru layak tapi salah tempat (*mis-matched*). Artinya letak kelangkaan pendidikan di...

- c. Layak dan sesuai dengan bidang studi yang diajarkan. Lulus jenjang pendidikan guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bila dilihat dari guru madrasah saat ini hampir 60 % guru madrasah negeri kategori tidak layak dan angka ini menjadi 80 % pada madrasah swasta. Termasuk layak tetapi salah kamar sebanyak 20 % pada madrasah negeri dan yang sisanya 20% betul-betul layak dan cocok. (Husni Rahim, 2001 : 165) dan Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, 2001 : 262). Inilah tantangan berat yang dihadapi madrasah, lebih-lebih bila melihat keadaan madrasah saat ini, dimana kualitas bidang studi umum masih sangat lemah. Keadaan ini dapat dilihat pada hasil ebtanas pada madrasah dengan sekolah umum.

Kemudian lebih dari itu adalah kurangnya kebutuhan guru berdasarkan ratio yang ditetapkan pun masih jauh dari harapan sekolah-sekolah swasta pada umumnya. Padahal guru adalah pemeran utama proses pendidikan yang amat menentukan tercapainya tujuan pendidikan dalam arti yang luas, lebih dari semata-mata hasil belajar akademik. Dalam menjalani tugas-tugas, seorang guru memerlukan rasa aman secara psikologis melalui kepastian insentif sebagai imbalan atas pekerjaan profesionalnya, sehingga keberpihakannya kepada murid dijalannya dengan sungguh-sungguh. Tanpa itu guru semakin tidak aktif atau malas dalam menjalani tugasnya, maka berdampak negatif terhadap sekolah itu, apalagi sekolah tersebut nota bene madrasah swasta.

Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) tidak cukup mendukung peningkatan kesejahteraan guru karena jumlahnya sangat sedikit atau kecil. Karena tiadanya sumber dana lain selain gaji. Sementara pemerintah daerah (Pemda), masyarakat dan orang tua siswa tidak peduli akan kesejahteraan guru. Para guru mencari cara-cara untuk meningkatkan taraf hidupnya. Cara ini pun dibenarkan oleh PP Nomor 20

tahun 1992 pasal 35, bahwa "tenaga kependidikan dapat bekerja diluar tugas pokoknya untuk memperoleh penghasilan tambahan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok".

Laporan Bank Dunia pada tahun 1994 menyebutkan bahwa 31,7% Kepala SD, 32,2% guru SD, 33,1% Kepala SLTP, 37,5% guru Bahasa Indonesia SLTP, dan 42 % guru Matematika SLTP mempunyai pekerjaan sampingan selain sebagai guru di sekolah lain, memberi les privat, kursus tambahan di sekolah atau ikut memasarkan buku-buku pelajaran dan alat-alat tulis. Dalam keadaan dan posisi yang demikian itu, kapan mutu pendidikan dapat terwujud.

Untuk memenuhi persoalan tersebut, usaha-usaha kearah itu perlu kiranya dilakukan, yaitu dengan : *Pertama*, mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD di Propinsi atau Kabupaten/ Kota untuk membantu kesejahteraan guru; kedua, menyediakan dana abadi bagi para guru yang dikelola oleh suatu yayasan. Dana tersebut didepositokan di bank, dan hasilnya digunakan untuk membayar kesejahteraan guru; ketiga, melakukan kampanye kepada masyarakat dalam rangka menggugah kepedulian mereka untuk ikut memperhatikan kesejahteraan guru.

Maka kesimpulannya adalah bahwa gaji yang besar perlu bagi guru. Ini adalah tuntutan yang universal bagi yang menjalani pekerjaannya secara profesional, oleh karenanya uang adalah amat diperlukan dalam meningkatkan profesinya. Ini semua tidak dapat dilakukan dengan baik bila gajinya kecil atau pas-pasan. Untuk itu gaji guru harus besar agar mereka ikhlas dan rajin mengajar.

Fasil Jalal dan Dedi Supriadi (2001 : 230) mengatakan bahwa kebijakan yang dilandaskan untuk meningkatkan mutu guru misalnya meningkatkan kesejahteraan

pendidikan, penataran-penataran, penyediaan dan prasarana pendidikan serta tersrukturisasi sistem insentif guru dengan menekankan pada “pemberian imbalan yang baik bagi guru yang berprestasi” (*merit system*) tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan selama persoalan mengenai rendahnya tingkat kesejahteraan guru belum terpecahkan dan ditingkatkan hingga mencapai standar yang layak untuk kehidupan guru bersama keluarganya.

*Kedua*, dana yang sangat minim. Dalam sistem pendidikan aspek dana merupakan aspek yang vital dan amat penting. Sehingga orang bertanya, mengapa sekolah-sekolah Islam masih banyak mutunya rendah, maka secara spontan dapat dijawab bahwa karena kekurangan dana atau uang. Madrasah yang akarab dengan masyarakat yang kurang beruntung, dihadapkan dengan dana, sarana dan prasarana yang seadanya. Ruang kelas yang tidak memadai, laboratorium dan perpustakaan yang tidak tersedia merupakan problem yang serius yang melengkapi kondisi madrasah.

Suyanto (2003:12) mengatakan bahwa sejak zaman setelah kemerdekaan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah belum memihak pada pendidikan. Ini dapat dilihat dari 75% anggaran pendidikan diserap oleh pendidikan kedinasan. Sedangkan non dinas hanya mendapat/ memperoleh sisanya. Sehingga keterpurukan dan rendahnya mutu pendidikan di negeri ini dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara semakin nyata. Disisi yang lain, dari pemanfaatan sisa anggaran itu, terjadi kebocoran dan kemacetan dana pendidikan yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga kedepan pemerintah lebih mengoptimalkan dana tersebut agar sekolah-sekolah

mendapat subsidi yang patut dan layak yang selama ini dirasakan sangat kurang bahkan tidak ada.

*Ketiga*, lemahnya manajemen. Kelemahan di bidang ini boleh di katakan "mewabah" yang menjangkit sebagian pengelola madrasah di tanah air. Minimnya pengetahuan tentang organisasi, tata kerja, merupakan beberapa penyebab yang saling berkait. Beberapa langkah manajemen modern, belum bisa berjalan secara tertib dan baik di madrasah. Dikarenakan keterbatasan tersebut sering kali manajemen madrasah lebih bercirikan "lillahita'ala". Sehingga beberapa prinsip manajemen yang baik seperti optimalisasi kemampuan sekolah, keterbukaan, khususnya dalam administrasi keuangan (*transparancy*) dan akuntabilitas (*accountability*) sering kali tidak berjalan atau macet. Selain itu, manajemen pada sekolah tidak efektif pada hal sekolah adalah institusi memegang peranan yang sangat menentukan dalam menentukan mutu pendidikan dan kepala sekolah merupakan pelaku utama dalam memainkan peranan tersebut. Di Indonesia kepala sekolah baik negeri maupun swasta sangat terbatas dalam mengelola sumber daya dan manajemen sekolah. Pada aspek yang lain, kepala sekolah tidak dilengkapi dengan kemampuan kepemimpinan dan manajemen yang baik, karena selain hanya di bekal beberapa hari pelatihan, rekrutmen mereka lebih didasarkan atas urutan jenjang kepangkatan. Untuk itu, kepala sekolah yang lemah akan gagal dalam mencari dukungan atau simpati masyarakat, oleh karena itu seorang pemimpin ( kepala sekolah) adalah merupakan faktor utama untuk maju mundurnya di madrasah. Jika seseorang kepala sekolah tidak memiliki kemampuan manajerial kependidikan, maka tidak terlalu

Peran seorang kepala sekolah adalah seorang menejer. Dia mengatur segala urusan madrasah, mulai dari masalah pembinaan hingga bagaimana upaya untuk meningkatkan mutu sekolah. Namun, jika kepala sekolah hanya sebagai pemimpin, niscaya ia tidak akan pernah mampu mengembangkan madrasah menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas.

*Keempat*, ketidakjelasan misi dan visi para pengelola madrasah. Misi dan visi pada dasarnya merupakan sarana pernyataan persepsi dan cita-cita sebuah madrasah. Keduanya merupakan pengejawantahan ide-ide konstruktif dalam setiap aktivitas. Misi dan visi di madrasah harus dibangun, dimana harus memahami dua syarat yaitu : (1) sejalan dengan kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat (*stakeholders*) dan (2) mampu mengakomodasi perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Para pengelola madrasah kurang memperhatikan hal ini, maka akan terjadi sebuah dilema yang sampai kini menyelimuti sebagian madrasah di tanah air, lebih-lebih madrasah swasta..

Melihat latar belakang sosial-ekonomi, tingkat kecerdasan dan motifasi siswa yang datang di sekolah saat ini telah lebih beragam bila dibandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu. Anak-anak yang berbeda latar belakangnya, motifasinya, aspirasi pendidikannya, kebutuhan belajarnya bahkan kondisi fisik dan kesehatannya, maka menurut Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001) perlu mendapat perhatian oleh para pengelola sebuah instansi termasuk di dalamnya madrasah. Artinya sekolah dituntut untuk lebih peka terhadap kondisi peserta didik yang beragam tersebut, tidak lagi dipukul rata bahkan semua anak sama, sehingga anak termotivasi untuk belajar. Tetapi jarang terjadi konsep seperti itu, malah banyak terjadi sebaliknya yaitu seperti ...

dikatakan Lynch bahwa kurang responsifnya sekolah dan aparat pendidik (termasuk dengan menetapkan kebijakan yang terlalu membebankan siswa secara ekonomis) terhadap kondisi di atas. Mereka hanya memikirkan pada gaya atau style daripada berfikir secara substansial dan mereka lebih berfikir secara "elitis dari pada berfikir populis", dan lebih dari itu adalah mereka melihat anak didik dengan menggunakan perspektif lama, yang sebetulnya telah lusuh dan kumal.

Berangkat dari persoalan diatas Damachsyari Dhoir (1983) mengatakan bahwa sesungguhnya kecilnya atau rendahnya minat lulusan madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar umum memilih madrasah Tsanawiyah (sekolah agama), disebabkan oleh :

- pertama*, kurangnya perhatian yang diberikan kepada lembaga Islam, baik oleh pemerintah , para ahli pendidik dan kalangan masyarakat;
- kedua*, keseluruhan tanggung jawab pembangunan lembaga pendidikan Islam hanya berada pada Departemen Agama
- Ketiga*, masyarakat sering salah dalam memberikan penilaian mereka yang menyelesaikan pendidikan dari sekolah –sekolah Islam hanya sebagai orang yang mempelajari agama semata. Atau mungkin karena : *pertama*, tidak cukupnya fasilitas dan sumber daya lainnya yang memungkinkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan; *kedua*, rendahnya pra syarat bagi pelaksana proses pendidikan secara berkualitas; *ketiga*, secara kelembagaan, birokrasi kependidikan Departemen Agama (sebagai lembaga pembina) masih sangat lemah, dilihat dari kurangnya sumber daya yang bisa menentukan kebijakan dan perencanaan; keempat adanya ketidakestaraan dalam



Dikotomi tersebut di atas itu lebih banyak berkaitan dengan persoalan politik. Lembaga-lembaga pendidikan Islam persoalannya bukan hanya menyangkut pendidikan Islam, tapi juga menyangkut ideologi.

Bagi umat Islam, madrasah, pesantren dan IAIN pada umumnya adalah simbol kejayaan Islam dan keberhasilan Islam di Indonesia.

Jadi tidak sekedar persoalan akademis, tapi lebih menyangkut ideologi umat Islam. Karena itu ketika dikeluarkan Keputusan Presiden No: 34 tahun 1972, pemerintah mencoba agar sebaiknya pendidikan (termasuk pendidikan agama) diurus oleh satu atap yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, umat Islam menentang keras. Begitu juga dengan IAIN digabung dengan UII, banyak orang protes dan tidak setuju.

Undang-undang pendidikan Nasional memang masih sangat kekurangan, perlu kiranya disempurnakan, tapi tidak perlu dibubarkan/ diafiliasi kemana, karena lembaga pendidikan Islam memang sangat strategis. Untuk itu lembaga ini betul-betul dilihat dari segi kepentingan umat Islam.

Dualisme modal pendidikan yang konfrontatif tersebut telah mengilhami munculnya gerakan reformasi dalam bidang pendidikan pada awal abad dua puluh. Gerakan ini bertujuan mengakomodasi sistem pendidikan sekolah ke dalam lingkungan pesantren, (Ismail SM dkk (Ed), 2002 : 226 ). Corak model pendidikan ini dengan cepat menyebar ke pelosok nusantara. Dari situlah embrio madrasah lahir.

Masa yang cukup panjang pendidikan Islam di Indonesia berada dipersimpang jalan antara mempertahankan tradisi lama dan mengadopsi perkembangan baru. Mempertahankan tradisi lama berarti mempertahankan *status quo* yang berakibat mundur walaupun memuaskan secara emosional dengan identitas pendidikan Islam masa

lalu, sedangkan mengadopsi perkembangan berarti mengesampingkan nilai autentik dari sejarah pendidikan Islam, walaupun berhasil memenuhi keperluan programatis untuk menjawab tantangan.

Jalan keluar dari situasi di atas menurut (Husni Rahim , 2001 : 17) menuntut adanya penegasan visi pendidikan Islam sehingga tidak tergotha oleh teriakan-teriakan ekstrim, tetapi mampu mengelola berbagai kecenderungan yang tersedia secara responsif dan tuntas. Atau dengan kata lain bahwa visi pendidikan Islam masa depan adalah terciptanya sistem pendidikan yang Islami, populis, berorientasi mutu dan kebhinekaan.

Karakter Islami pada lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, merupakan identitas utama yang harus tercermin dalam kurikulum dan proses pendidikan. Berbeda dengan lembaga pendidikan sekular, pendidikan Islam dilaksanakan dengan mengejawantahkan nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan dan perilaku semua komponen pendidikan mulai dari pimpinan sampai dengan siswa. Karakter Islam juga berarti strategi pembelajaran keagamaan yang tidak verbalistik sehingga memudahkan siswa untuk mengembangkan ketrampilan dan wawasan keislamannya secara terpadu.

Karakter populis pada lembaga pendidikan Islam merupakan pesan utama dari sejarah pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. Pendidikan Islam lahir dan berkembang dengan dukungan masyarakat dan terbuka bagi semua lapisan sosial. Dalam banyak kasus lembaga ini mengabaikan watak populisnya, sehingga mati ditinggalkan oleh masa pendukungnya.

Hal lain sebagai tantangan yang sangat dirasakan saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan Islam. Padahal penghargaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan sangat

Kualitas pendidikan itu tercermin dari

dua hal yaitu: proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan menggambarkan suasana pembelajaran yang aktif dan dinamis serta konsisten dengan program dan target pembelajaran. Sedang hasil pendidikan menunjukkan pada kualitas lulusan dalam bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jika gagal dalam mewujudkan visi ini, lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah akan tertinggal dari lembaga-lembaga pendidikan lain.

Karakter keagamaan pendidikan Islam pada prinsipnya menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Praktek penyeragaman terjadi selama tiga dekade terakhir disadari telah mematikan kreatifitas pengelola dan pengembangan pendidikan Islam. Hal ini sekaligus bertentangan dengan watak populis yang meniscayakan adanya lembaga, model, dan pendekatan pendidikan yang berfareasi sesuai dengan kompleksitas masyarakat.

Masa depan pendidikan Islam di Indonesia ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, dunia pendidikan Islam pada dasarnya masih menghadapi problem pokok berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan faktor eksternal, masa depan pendidikan Islam dipengaruhi oleh tiga isu besar yaitu globalisasi, demokratisasi dan liberalisasi Islam.

Berangkat dari berbagai persoalan di atas, di daerah -daerah terpencil, apakah madrasah Tsanawiyah masih menjadi idola bagi tamatan madrasah ibtidayah maupun sekolah dasar lainnya ? Dan apakah proses pendidikan dan hasil pendidikan pada pendidikan Islam sudah sesuai dengan keinginan tersebut di atas? Nampaknya madrasah masih jauh dari harapan itu, dan akan tertinggal dengan lembaga-lembaga pendidikan lain. Hal ini tercermin pada minat lulusan madrasah Ibtidayah memilih sekolah agama

(MTS) di wilayah kecamatan Paliyan setiap tahun ajaran menurun. Buktinya data lulusan dari 4 Madrasah Ibtidaiyah tahun pelajaran 2001-2002 memilih Madrasah Ibtidaiyah dari 157 orang hanya 31 orang (19,74%). Dan tahun 2002-2003 dari 148 orang hanya 29 orang (19,59%). Sedangkan lulusan madrasah Ibtidaiyah memilih sekolah umum tahun 2001 - 2002 sangat tinggi yaitu 75% (118 orang) dan 5,09% (8 orang) tidak melanjutkan. Lulusan MI ke sekolah umum tahun 2002 - 2003 sebanyak 102 orang (68,91%) tidak melanjutkan 17 orang (11,49%). (Data dari Kantor Cabang Pendidikan Kecamatan Paliyan 2001 -2002 dan 2002-2003)

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk melihat minat lulusan madrasah Ibtidaiyah memilih sekolah agama (MTS) perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini didasari pada kenyataan yang ada dilapangan maupun informasi-informasi referensi/ literatur yang ada.

Memang ketentuan UUSPN tahun 1989, menegaskan bahwa madrasah pada seluruh levelnya adalah ekuifalen dengan sekolah-sekolah umum. Sebagai konsekuensinya, madrasah harus mengadopsi dan menerapkan kurikulum umum (Diknas). Madrasah dengan ketiga tingkatannya pada dasarnya adalah sekolah umum yang "berciri Islam ". Ciri khas Islam menurut (Dhofier, 1996 : 64) melalui tiga bentuk :

*Pertama*, penjabaran mata pelajaran pendidikan Agama Islam menjadi 5 mata pelajaran

yaitu: Al-Qur'an Hadis, Fiqih, Aqidah Akhlak, SKI dan Bahasa Arab

*Kedua*, menciptakan suasana keagamaan, antara lain melalui : a) suasana kehidupan madrasah yang agamis, b) adanya sarana ibadah, c) penggunaan metode pendekatan yang agamis dalam penyajian mata pelajaran yang memungkinkan, dan d) kualitas guru, antara lain guru madrasah harus beragama Islam dan berakhlak mulia.

Guna memberikan cirikhas Islam pada madrasah tidak hanya dalam kurikulum. Karena itu ditetapkan tiga program utama yaitu : Pertama, program Mafikibb dengan nuansa Islam. Kedua: program pelajaran agama dengan nuansa IPTEK, dan Ketiga, program penciptaan suasana keagamaan di madrasah Husni Rohim (2001: 140).

Program Mafikibb dengan nuansa Islam bermaksud mengembangkan bidang kajian matematika, fisika, kimia, biologi dan bahasa Inggris lebih bernuansa Islam. Program ini menopong proyek integrasi ilmu-ilmu umum dengan ilmu agama. Pada masa kemajuan Islam, kedua ilmu tersebut diperkenalkan dan dikembangkan oleh ilmuwan Islam tanpa mendikotomikan secara tajam. Namun, akibat dominannya Filsafat Barat yang sekuler kedua ilmu tersebut di bedakan secara tajam. Program ini hendak memadukan kembali kedua bidang kajian Islam secara intergral.

Sebuah ide yang mendukung pernyataan tersebut yang dinyatakan oleh Soedjatmoko dalam (Muhaimin,2002 : 89) bahwa pendidikan agama harus berusaha berintegrasi dan bersinkronisasi dengan pendidikan non agama. Pendidikan agama tidak boleh dan tidak dapat berjalan sendiri tetapi harus berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non agama kalau ia ingin mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Sebuah contoh yang dikatakan peneliti IAIN Sunan Ampel Malang dalam memadukan/menintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum yaitu kerja sama antara

guru agama dan guru-guru bidang studi umum. bentuk kerja sama itu bertujuan untuk; pertama, memberi masukan untuk menanamkan materi agama kedalam materi pelajaran umum (IPS, Fisika, Biologi dan lain-lain); kedua, kerjasama untuk mengawasi perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari dan ketiga, melibatkan guru bidang studi umum dalam khutbah Jum'at dan imam dalam sholat jamaah dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang selama ini menurut Mochtar Buchori, bahwa kegiatan pendidikan agama banyak bersifat menyendiri (Muhaimin, 2002:302).

Madrasah sebagai ekuivalen dengan sekolah-sekolah umum, ternyata lulusan madrasah Ibtidaiyah dan sekolah dasar lainnya memilih sekolah agama (MTS) masih sangat rendah dibandingkan dengan sekolah – sekolah umum (SLTP Negeri).

Pertama, Departemen Agama saat ini, baik kuantitatif maupu kualitatif belum memenuhi guru sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rasio yang ditetapkan. Kualitas guru yang dirasakan saat ini adalah kurangnya tenaga guru untuk mata pelajaran umum (MIPA dan Bahasa Inggris). Masalah ini kemudian muncul masalah berikutnya yaitu ketidaksesuaian antara keahlian dan mata pelajaran yang diajarkan. Masalah ini timbul akibat dari kelebihan jumlah guru mata pelajaran Agama, sehingga difungsikan/dimanfaatkan untuk mengajar mata pelajaran umum. Selain itu juga, tingkat kemampuan profesional guru , baik dari segi substansi ilmu dalam mata pelajaran yang dipegang maupun kemampuan dan penguasaan metologi keguruannya. Hal tersebut difahami karena belum terpenuhinya standar kualitas pendidikan guru sebagai mana diisyaratkan , yaitu MI yang belum memiliki ijazah D.2, demikian juga halnya dengan MTS masih

banyak ditemukan guru-guru yang ijazahnya di bawah D.2

Kedua, sebagai mana halnya dengan, tenaga guru, pembinaan madrasah dihadapkan pada masalah terbatasnya sarana dan prasarana, baik berupa gedung maupun alat pendidikan lainnya, karena terbatasnya sumber daya dan sumber dana. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah, sangat dirasakan sekali pada madrasah swasta pada umumnya, termasuk madrasah sebagai obyek penelitian ini. Keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan menurunnya mutu sekolah, (Prayitno, 1977 : 14).

Ahmad Tafsir (2001 : 90) berpendapat bahwa peralatan yang berupa gedung, perpustakaan, alat-alat yang digunakan tatkala belajar di kelas, amat erat hubungannya dengan mutu sekolah, apalagi bila alat-alat peraga, alat bantu seperti dalam pengajaran fisika, biologi, anatomi atau geografi. Banyak sekali konsep pengetahuan yang harus dipelajari murid yang amat sulit, bahkan tidak mungkin dipahami tanpa bantuan alat pelajaran. Bagaimana kita membayangkan pengajaran anatomi manusia tanpa bantuan alat berupa tiruan tubuh manusia? Pengajaran tentang haji dapat dilakukan efektif dan efisien dengan bantuan rekaman video, dan yang lainnya.

Drs. Sumpeno, Kepala Madrasah YAPPI, mengakui bagaimana mungkin dapat membeli peralatan sekolah, sedangkan dana tidak ada. Dana diperoleh dari pembayaran SPP murid, itupun hanya digunakan untuk membayar gaji guru. Sedangkan dari yayasan, tidak ada sama sekali, Yayasan hanya memiliki tanah. Baik perangkat keras maupun perangkat lunak yayasan meyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan sekolah dengan masyarakat. Secara moral MTS YAPPI milik Yayasan Nahdatul Ulama tapi pada tatanan perkembangan selanjutnya diserahkan sepenuhnya pada pengelola pendidikan itu.

Bagi Yayasan seolah-olah berdirinya sekolah itulah yang penting, jika sekolah

sudah berjalan yang lain bisa diatur dengan mudah. Tapi kenyataan dapat kita saksikan

bersama, sekolah tidak terurus, mati atau hidup sekolah bukan urusannya pada umumnya kepala sekolah dan guru dihadapkan pada pemanfaatan bangunan dan fasilitas yang ada. Peralatan yang tua, tapi belum lapuk, dapat saja digunakan menggantikan yang baru, pasti memerlukan biaya yang besar. Dalam hal ini sebetulnya renovasi, terutama perbaikan interior ruangan, merupakan daya tarik tersendiri. Semuanya tidak perlu baru, tapi peralatannya itu yang amat penting. Kadang – kadang sekolah Islam masih kurang perencanaan. Sudah tidak punya dana, perencanaan tidak jelas berdampak pada rendahnya mutu sekolah .

Ketiga, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, apalagi madrasah swasta diuntut untuk melakukan perubahan – perubahan strategis dalam bidang manajemen, sehingga mutu tetap terjaga serta minat peserta didik selalu menaruh perhatian yang besar. Dalam kapasitas ini pimpinan madrasah (Kepala Sekolah) dan yayasan dituntut memiliki visi, tanggung jawab, wawasan dan ketrampilan manajemen yang tangguh. Keduanya, hendaknya dapat memainkan peran sebagai lokomotif perubahan menuju terciptanya madrasah yang berkualitas .

Di lapangan sering kali terjadi ketidak kompakn antara pihak sekolah dengan yayasan, seperti telah didiskripsikan di atas . Untuk itu, aktivitas manajemen dengan melihat keterbatasan itu, lebih ditekankan pada upaya untuk menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Bila hal ini tidak dilakukan dengan baik akan menghambat madrasah tersebut untuk bersaing dengan sekolah lain .

Keempat , sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat, madrasah lebih mudah mengintegrasikan lingkungan eksternal ke dalam organisasi pendidikan, sehingga dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kepemilikan yang tinggi dari



masyarakat . Keterlibatan masyarakat tidak saja terbatas seperti peran orang tua siswa (POMG) yang hanya terbatas pada suatu tempat di mana anaknya sekolah tetapi lebih dari itu yaitu didasarkan kepada kepemilikan lingkungan . Untuk itu masyarakat di tuntut memiliki kepedulian yang tinggi memperhatikan lembaga pendidikan yang berada dilingkungannya. Hal ini dapat menambah sikap kepemilikan yang tinggi dengan memberikan kontribusi baik dalam bidang material, kontrol manajemen, pembinaan serta bentuk partisipasi lainnya.

UUSPN NO. 20 tahun 2003 pasal 54 ayat 1 dan 2 mengisyaratkan, bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mata pelajaran pendidikan serta peran sebagai sumber, pelaksanaan dan pengguna hasil pendidikan .

Isyarat tersebut dalam kehidupan masyarakat pedesaan masih sangat kecil untuk diharapkan, baik sentuhan pikiran, tenaga profesional dan lainnya. Ini disebabkan oleh pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masih berorientasi pada hal-hal yang bersifat kebendaan, sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang memerlukan waktu dan pengorbanan, sikap masyarakat masih perlu digugah, sebagian besar masyarakat masih memiliki budaya statis, merasa puas dengan apa yang ada, bersifat menunggu, menerima, kurang proaktif untuk mengambil inisiatif / prakarsa dan melakukan tindakan yang bermanfaat untuk masa depan, tokoh – tokoh masyarakat yang seyogyanya berperan sebagai panutan sering berperilaku seperti birokrat, baik perencanaan maupun pelaksanaan program, serta keterbatasan anggaran dan keterbatasan sarana dan prasarana belajar, keterbatasan tenaga kependidikan dapat mengakibatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan dan program pendidikan berkurang, (Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, 2001:196).

Kepala sekolah MTS Muhammadiyah Sodo menuturkan, bahwa setiap triwulan pihak sekolah bertema dengan BP3 dan tokoh masyarakat membicarakan persoalan-persoalan yang di hadapi sekolah, salah satunya adalah penerimaan murid baru pada awal tahun pelajaran. Sosialisasi MTS juga tidak henti-hentinya. Tapi kenyataannya ketika pendaftaran murid baru kepedulian masyarakat kepada MTS sangat - sangat kecil ini terlihat pada animo siswa memilih MTS dari tahun ketahun konstan bahkan dua tahun terakhir ini menurun .

Melihat kenyataan seperti tersebut di atas hemat penulis, sekiranya masyarakat terlibat sebagai permrakarsa, mediator, motivator dan lain - lain masih membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat kapabilitas masyarakat belum terdorong ke arah itu . Apalagi masyarakat di kerapkan sebagai penyandang dana dan peyediaan fasilitas pendidikan, juga masih jauh dari keinginan itu, karena masyarakat pedesaan pada tatanan penghasilan income perkapita pertahun masih "kelabu" . Indikasi kearah itu cukup jelas dimana pembayaran SPP murid pada dua Madrasah Tsanawiyah tidak tepat waktu , bahkan ada yang molor berbulan - bulan (wawancara dengan Kepala MTs Muhammadiyah Sodo dan Kepala MTs YAPPI Mulusan tanggal 28 Oktober 2003).

### **C. Batasan Masalah**

Berbicara mengenai lembaga Pendidikan Islam tentu didalamnya terdapat

madrasah. Jumlah madrasah Tsanawiyah di seluruh Indonesia saat ini:

- Filial 8.625 buah

- Swasta 7.547 buah, Husni Rahim ( 2001 : 108 )

Diantara berbagai masalah yang sangat berat dihadapi dalam upaya pembinaan madrasah adalah tidak seimbangnya jumlah madrasah negeri dibandingkan jumlah madrasah swasta , disamping itu juga penyebaran madrasah tidak merata .

Besarnya jumlah madrasah swasta ini memang berkaitan dengan sejarah pendidikan di Indonesia , khususnya Pendidikan Islam ; dimana peran serta masyarakat dalam pengembangan madrasah sangat besar . Anggota masyarakat, karena motifasi agama banyak menyediakan tanah wakap atau dana untuk membangun madrasah, sehingga jumlah madrasah swasta demikian banyak. Prakarsa dan peran serta masyarakat yang demikian besar dalam bidang pendidikan tersebut ,khususnya madrasah memang patut di hargai dan perlu terus dibantu .

Namun ,dana yang dikumpulkan dalam masyarakat muslim dalam pengembangan pendidikan Islam dewasa ini sangat terbatas sementara biaya pendidikan semakin mahal, sehingga tuntutan untuk terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan madrasah terus menerus ketinggalan dengan dunia pendidikan yang lain. Pada umumnya, madrasah swasta berada dalam keadaan serba kekurangan karena menampung siswa-siswa dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah. Akibatnya, biaya untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar terhambat.

Disisi yang lain, pemerintah masih mengutamakan strategi pengembangannya pada sekolah-sekolah negeri khususnya dalam penyediaan tenaga guru dan pembagian alokasi dana pembiayaan tenaga pendidikan lainnya.

Berpijak dari kondisi obyektif tersebut, maka timbulnya permasalahan berikutnya yaitu rendahnya minat lulusan madrasah ibtidaiyah memilih sekolah agama (MTs). Agar dalam penelitian ini dapat menghasilkan sesuatu yang optimal dan terfokus, maka penelitian ini dibatasi pada:

Minat siswa memilih sekolah agama (MTs) atas keinginan sendiri, minat siswa memilih sekolah Agama (MTs) atas dorongan orang lain dan minat siswa memilih sekolah agama (MTs) atas pengaruh lingkungan serta faktor pendorong dan penghambat dalam memilih sekolah agama (MTs).

#### **D. Rumusan Masalah**

Beberapa masalah seputar minat lulusan madrasah Ibtidaiyah memilih sekolah agama (MTs) sangat rendah . Masalah-masalah ini antara lain disebabkan atas: rendahnya kualitas guru, kekurangan tenaga guru sesuai dengan bidang tugasnya, terbatasnya fasilitas baik sarana dan prasarana (gedung, buku perpustakaan, dan fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya), pengelola yang kurang memiliki visi - misi dan tanggung jawab yang sama dalam mengelola sebuah instansi swasta serta rendahnya peran serta masyarakat terhadap madrasah yang dibangunnya sendiri tersebut. Berangkat dari masalah tersebut maka dalam perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Apa yang mendorong para siswa memilih sekolah agama (MTs)? Apakah atas keinginan sendiri? Apakah atas dorongan orang lain ataukah pengaruh lingkungan?

### **E. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui seberapa besar minat siswa memilih sekolah agama (MTs), baik atas keinginannya sendiri, dorongan orang lain dan pengaruh lingkungannya.
2. Mengetahui juga seberapa besar faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam siswa memilih sekolah agama (MTs) tersebut.

### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap prospek pengembangan ilmu sosial khususnya pendidikan Islam, terutama dalam kaitannya dengan minat lulusan madrasah Ibtidaiyah memilih sekolah agama (MTs), dan upaya-upaya lembaga pendidikan Islam mengatasi kesulitan yang dihadapi selama ini.
2. Memberikan rekomendasi kepada universitas Muhammadiyah untuk disampaikan kepada pemerintah, mengingat pendidikan Islam merupakan cikal bakal kaderisasi ulama ples dan intelektual muda anak bangsa dimasa yang akan datang kurang sekali mendapat perhatian.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat luas, bahwa SKB tiga menteri belum maksimal pemberlakuannya, karena adanya ketidak setaraan dalam peluang pengembangan pendidikan.

## G. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui minat lulusan Madrasah Ibtidaiyah memilih sekolah agama (MTs), baik keinginan sendiri, dorongan orang lain dan pengaruh lingkungan. Ada anggapan bahwa sekolah agama merupakan sekolah kelas dua setelah sekolah umum bagi lulusan madrasah maupun sekolah dasar. Pendapat tersebut tidak selamanya benar dan tidak selamanya salah. Terlepas dari pendapat di atas, penelitian ini mencoba mengungkap permasalahan yang belum terjawab atau belum diteliti oleh penelitian sebelumnya. Penelitian serupa telah dilakukan oleh Yunus Laga (1989) berjudul "Minat Siswa Memilih Madrasah Tsanawiyah bagi Lulusan Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Malang".

Tujuan penelitian yang telah dilakukan oleh Yunus Laga adalah untuk memperoleh data sejauh mana minat lulusan Sekolah Dasar Muhammadiyah yang memilih madrasah Tsanawiyah.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum minat siswa memilih madrasah Tsanawiyah bagi lulusan Sekolah Dasar Muhammadiyah sangat kecil, bahwa secara logika memang tidak ada hubungan yang terstruktur antara SD Muhammadiyah dengan MTs. SD Muhammadiyah milik Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan MTs adalah milik Departemen Agama. Wajar bila hasil yang tersebut di atas adalah seperti itu. Bagaimana dengan Madrasah Ibtidaiyah memilih sekolah agama (MTs) yang mempunyai hierarki yang jelas. Apakah hasilnya sama ataukah berbeda? Ternyata hasilnya tidak ada perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada lampiran penelitian dalam bab IV

Paliyan sebagai obyek penelitian ini karena Kecamatan Paliyan berada di 'zone Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Kecamatan Panggang, Purwosari, Saptosari dan Tepus. Yang memiliki empat madrasah Ibtidaiyah dan dua madrasah Tsanawiyah, sedangkan yang lainnya hanya memiliki tidak lebih dari dua baik madrasah Ibtidaiyah maupun madrasah Tsanawiyah, bahkan ada yang tidak memiliki madrasah.

Untuk itu penulis berkeinginan mengadakan penelitian ini karena beberapa alasan